



Kemunduran Demokrasi di Amerika Latin: Studi Komparasi *Petrostate* Venezuela dan *Stable Democracy* Chile, 2000-2020

Avelia Evelyn Dwi Novita¹⁾, Wishnu Mahendra Wiswayana²⁾

Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

aveliaevelyn@student.ub.ac.id¹⁾

wishnu.mahendra@ub.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak ketergantungan pada minyak terhadap kualitas demokrasi di dua negara Amerika Latin, yaitu Venezuela dan Chile selama periode 2000–2020. Kedua negara dipilih karena mewakili dua kutub ekstrem dalam dinamika demokrasi dan pengelolaan sumber daya alam. Venezuela mengalami kemunduran demokrasi di tengah dominasi ekonomi minyak, sementara Chile tetap mempertahankan stabilitas demokrasi meskipun juga memiliki kekayaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dengan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel ekonomi dan demokrasi. Data sekunder digunakan untuk mengukur berbagai dimensi demokrasi berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh *Varieties of Democracy* (V-Dem) dan *Freedom House*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi minyak memiliki hubungan yang signifikan terhadap penurunan kualitas demokrasi, sementara pendapatan minyak dan *GDP Per Capita* menunjukkan pengaruh yang tidak konsisten. Penelitian ini menekankan pentingnya peran institusi sebagai faktor penentu dalam membentuk respons negara terhadap kekayaan sumber daya. Temuan ini memperkaya kajian mengenai *Rentier State Theory* dengan menunjukkan bahwa dampak kekayaan alam terhadap demokrasi sangat bergantung pada jalur institusional dan kapasitas tata kelola masing-masing negara.

Kata kunci: Amerika Latin, Demokrasi, *Petrostate*, *Rentier State Theory*

Abstract

This study analyzes the effect of oil dependence on the quality of democracy in two Latin American countries, Venezuela and Chile, during the period of 2000–2020. These two countries were selected as they represent extreme contrasts in democratic dynamics and natural resource management. Venezuela, a classic example of a petrostate highly reliant on oil for its economy, experienced a significant democratic decline. In stark contrast, Chile, despite also possessing abundant natural resources like copper, maintained its status as a stable democracy due to its robust institutional framework. This study uses a comparative quantitative approach with multiple linear regression analysis to examine the relationship between economic and democracy variables. Secondary data, utilizing indicators developed by Varieties of Democracy (V-Dem) and Freedom House, were used to measure various dimensions of democracy. The findings indicate that Oil Production has a significant relationship with democratic decline, while Oil Rent and GDP Per Capita show inconsistent effects. This research underscores the crucial role of institutions as a determining factor in shaping a state's response to resource wealth. Ultimately, these findings enrich Rentier State Theory by demonstrating that the impact of natural wealth on democracy is highly dependent on each country's institutional path and governance capacity.

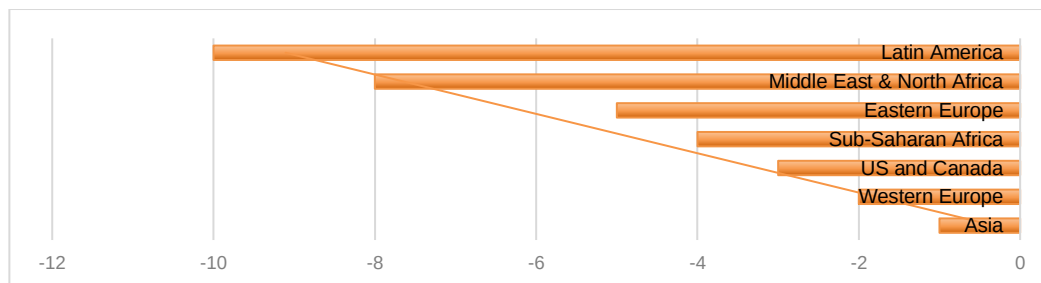
Key words: Democracy, Latin America, *Petrostate*, *Rentier State Theory*.

PENDAHULUAN

Kondisi demokrasi di negara-negara kaya sumber daya alam, khususnya minyak, sering kali menghadapi tantangan serius. Meskipun memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, negara-negara ini cenderung mengalami regresi demokrasi, ditandai dengan berkurangnya kebebasan sipil, menurunnya integritas pemilihan umum, diikuti dengan konsentrasi kekuasaan oleh para eksekutif negara (Ajili & Hasanichenar, 2022). Fenomena ini dikenal sebagai kutukan sumber daya atau *resource curse*, yaitu paradoks di mana kekayaan alam justru menghambat demokratisasi. Michael Ross dalam *"The Oil Curse"* mengeksplorasi mengenai hubungan antara demokrasi dan kekayaan minyak yang mampu menjadi pemicu terbesar otoritarianisme di negara-negara *petrostate* yang bergantung pada pendapatan minyak. Kutukan minyak tersebut menjadi faktor yang dapat menghambat dialog antara rakyat dan pemerintah, serta mempersulit transisi menuju demokrasi (Ross, 2012).

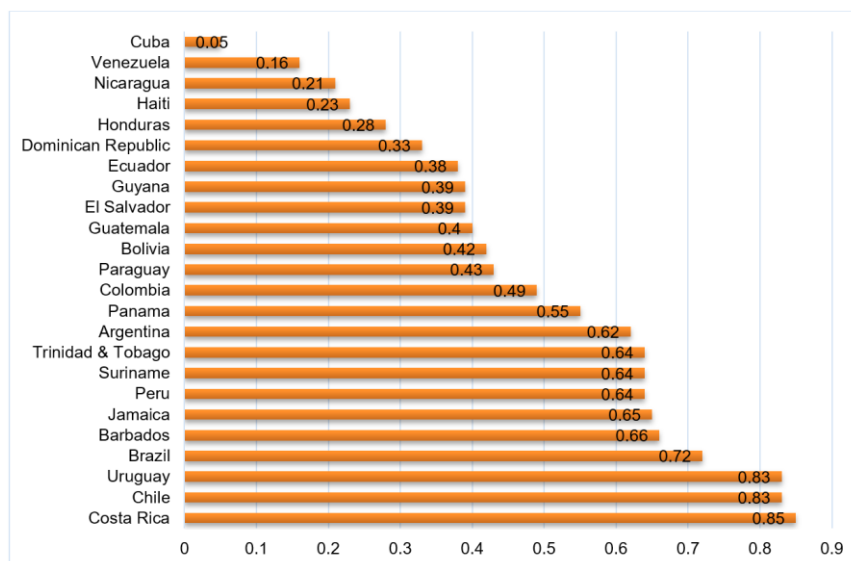
Ketergantungan pada minyak dapat mengubah negara menjadi negara penyewa atau *rentier state*, di mana pendapatan utama negara berasal dari sewa sumber daya alam, bukan dari pajak negara (Ross, 2001). Dalam konteks ini, akuntabilitas pemerintah menjadi menurun dan diikuti dengan adanya pemanfaatan sumber daya guna memperkuat patronase politik. Fenomena ini mengancam demokrasi, di mana pemimpin negara memanfaatkan lembaga demokrasi seperti lembaga pemilihan umum, badan legislatif, pengadilan, dan media. Ancaman terhadap demokrasi kini lebih sering datang dari pelemahan internal institusi, bukan kudeta militer (Dean, 2024).

Penelitian Ross (2001) dalam *"Does Oil Hinder Democracy"* menjadi landasan utama dalam hubungan antara kekayaan minyak dan penurunan demokrasi. Penelitian ini membuktikan bagaimana ketergantungan minyak dapat menghambat proses demokratisasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta wilayah lain yang memiliki karakteristik institusional dan ekonomi yang rentan. Temuan Ross kuat secara statistik untuk membuktikan bahwa penghambatan demokrasi memiliki dampak yang lebih besar pada negara miskin dibanding negara kaya.



Grafik 1. Penurunan Skor Indeks Demokrasi Berdasarkan Kawasan (2008-2022)
Sumber: Diolah oleh penulis dari *The Economist* (2023)

Secara global, kawasan Amerika Latin merupakan kawasan yang paling terdampak oleh tren penurunan demokrasi. Data dari *The Economist* di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2008-2023, indeks demokrasi Amerika Latin menyentuh angka minus 10. Skor tersebut lebih rendah dibanding Timur Tengah dan Afrika Utara yang selama ini dikenal sebagai negara dengan otoritarianisme yang kuat. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Amerika Latin justru mengalami penurunan struktural, mengindikasikan adanya krisis legitimasi dan efektivitas institusi demokratis (The Economist, 2023).



Grafik 2. Indeks Demokrasi Liberal di Amerika Latin, 2000-2020
Sumber: Diolah oleh penulis dari V-Dem

Data dari *Varieties of Democracy* (V-Dem) pada tahun 2000-2020 menunjukkan adanya indeks demokrasi liberal yang timpang di Amerika Latin, dengan skala 0 (otoriter) hingga 1 (demokrasi penuh). Hanya ada tiga negara (Uruguay, Chile, dan Kosta Rika) yang mencapai skor 0.8, menandakan demokrasi penuh. Sementara itu, mayoritas negara berada dalam kategori demokrasi cacat dan rezim hibrida, dengan Venezuela (0.16) dan Kuba (0.05) sebagai negara otoriter. Disparitas skor ini mengindikasikan adanya ketimpangan institusional, sehingga perlu ditelisik mengenai permasalahan di dalamnya.

Kesenjangan demokrasi ini diperkuat oleh Garrastazu & Cagley (2023) yang menyatakan bahwa sistem demokrasi di Amerika Latin cenderung mendekati rezim otoriter dan menjadi rentan. Berdasarkan data ini, Chile dan Venezuela dipilih sebagai studi kasus karena merepresentasikan dua kutub ekstrem dari spektrum demokrasi di Amerika Latin. Meskipun Uruguay dan Kuba juga menunjukkan kontras, pemilihan Chile dan Venezuela didasarkan pada karakteristik dan relevansi teoritis yang kuat terkait dinamika demokrasi mereka. Uruguay memiliki demokrasi yang stabil sejak 1980-an dan Kuba telah menjadi negara otoriter sejak 1959, menunjukkan trayektori politik yang relatif konsisten. Sebaliknya, Venezuela dan Chile menunjukkan pergeseran signifikan dalam trayektori demokrasi mereka selama dua dekade terakhir. Perbandingan ekstrem ini memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keberhasilan atau kegagalan konsolidasi demokrasi, khususnya di negara-negara kaya sumber daya alam.

Venezuela menjadi contoh negara yang bertransisi dari demokrasi cacat ke otoritarianisme penuh dalam waktu singkat. Kemunduran demokrasi di Venezuela terlihat sejak masa pemerintahan Presiden Hugo Chávez (1999-2013) dan Nicolás Maduro (2013-sekarang), diperparah oleh konsentrasi kekuasaan dan pengabaian prinsip demokrasi oleh pemimpin terpilih (Levitsky & Ziblatt, 2018). Fenomena ini sejalan dengan peningkatan ketergantungan pada minyak dan keruntuhan institusi negara, menjadikan Venezuela kasus klasik *petrostate* dan "kutukan sumber daya" di Amerika Latin. Kekayaan minyak di Venezuela dimanfaatkan untuk praktik patronase, menekan oposisi, dan melemahkan demokrasi. Sebaliknya, Chile menghadirkan sebuah studi tentang demokrasi yang cukup langka. Meski tidak bergantung pada minyak seperti Venezuela, Chile merupakan negara yang kaya akan tembaga, di mana kontribusi tembaga tersebut sangat besar terhadap pendapatan pajak negara (Singh, 2010). Keberhasilan transisi demokrasi pasca-otoritarianisme dan konsolidasi institusi di Chile menjadi kasus ekstrem yang kontras dan penting sebagai studi pembandingan dalam penelitian ini.



Perbedaan mencolok antara Chile sebagai kisah sukses dan Venezuela sebagai negara yang tertinggal dalam pembangunan demokrasi secara jelas menggarisbawahi interaksi kompleks antara demokrasi, tata kelola, dan kondisi ekonomi di Amerika Latin (Navia, 2011). Dengan demikian, artikel jurnal ini bertujuan menjelaskan bagaimana ketergantungan sumber daya alam dapat memengaruhi demokrasi di Amerika Latin melalui studi kasus Venezuela dan Chile, dengan menggunakan *Rentier State Theory* dan analisis regresi linier berganda.

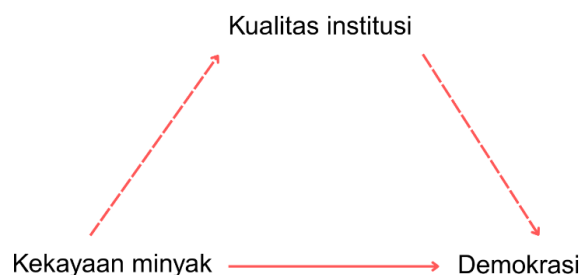
KERANGKA TEORI

Korelasi antara minyak dan demokrasi merupakan diskursus kompleks yang telah lama diteliti. Negara-negara yang bergantung pada pendapatan minyak cenderung mengadopsi struktur negara penyewa. Dalam konteks rezim otoriter, pendapatan minyak sering kali digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, menekan perbedaan pendapat, dan membatasi demokrasi (Ross, 2008). *Rentier State Theory* (RST) yang dikembangkan sejak tahun 1987-an oleh Hossein Mahdavi dan Giovanni Arrighi, menjelaskan bagaimana ketergantungan pada pendapatan sumber daya dapat memengaruhi struktur ekonomi dan politik suatu negara, terutama pada keberlangsungan demokrasinya (Ajili & Hasanichenar, 2022).

Sejalan dengan RST, konsep *petrostate* menggambarkan negara yang bergantung pada ekspor minyak, memiliki lembaga demokrasi yang lemah, dan dipimpin oleh rezim otoriter. Dalam *petrostate*, pendapatan dari penjualan minyak internasional diinterpretasikan sebagai bentuk sewa yang menguntungkan pemerintah, bukan masyarakat umum atau perusahaan swasta. Penelitian Tarzi & Schackow, (2012) lebih lanjut menunjukkan korelasi antara ketergantungan negara kaya minyak pada ekspor sebagai sumber utama pendapatan negara dan autokrasi. *Petrostate* cenderung memiliki lembaga-lembaga demokrasi yang lemah, konsentrasi kekuasaan pada beberapa aktor, kekayaan sumber daya alam yang tinggi, sektor publik yang tidak berfungsi optimal, dan ketimpangan ekonomi yang mencolok. Dengan demikian, perekonomian yang bergantung pada sumber daya alam dapat membentuk dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda, seringkali mengarah pada otoritarianisme. Selain itu, teori ini juga berkembang untuk menjelaskan fenomena seperti korupsi dan kurangnya partisipasi politik dalam suatu negara.

Ross (2001) mengidentifikasi tiga mekanisme kausal utama yang menghubungkan kekayaan minyak dengan kondisi demokrasi. Pertama, *Rentier Effect* menjelaskan bagaimana pemerintah di negara kaya minyak cenderung mengandalkan pendapatan dari sektor ini tanpa perlu memungut pajak yang signifikan dari warganya. Kondisi ini, seperti yang ditemukan Ross (2008), dapat meningkatkan pendapatan pemerintah namun juga berpotensi memperkuat patronase politik dan melemahkan kualitas layanan publik. Kedua, *Repression Effect* mengindikasikan bahwa kekayaan minyak memungkinkan rezim otoriter untuk berinvestasi besar-besaran pada pasukan keamanan internal. Hal ini secara efektif menekan perbedaan pendapat dan mempertahankan kendali atas masyarakat, sehingga korelasi antara kekayaan minyak dan otoritarianisme sebagian besar disebabkan oleh kapasitas rezim *petrostate* untuk meningkatkan represi. Ketiga, *Modernization Effect* menjelaskan bahwa kekayaan minyak justru dapat memperlambat transformasi sosial bagi demokratisasi, terutama jika pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak diimbangi dengan peningkatan partisipasi politik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Namun, Ross (2001) juga berargumen bahwa *Rentier Effect* dan *Repression Effect* dapat gagal ketika *petrostate* memiliki kualitas demokrasi dan kebebasan politik yang baik. Salah satunya ketika pemerintah memanfaatkan pendapatan dari kekayaan alam untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasinya serta membuat *check and balances* yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.



Gambar 1. Kekayaan Minyak dan Lembaga-Lembaga Demokrasi
(Hubungan Langsung dan Tidak Langsung)
Sumber: Bergougui & Murshed (2020)

Studi oleh Bergougui & Murshed (2020) menunjukkan bahwa hubungan antara minyak dan demokrasi tidak selalu linier, karena beberapa negara kaya sumber daya justru berhasil memperkuat demokrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas institusi sangat memengaruhi efek minyak terhadap demokrasi. Bergougui dan Murshed berargumen bahwa pengaruh kekayaan minyak dapat bersifat tidak langsung. Pada gambar di atas, panah solid menunjukkan bahwa minyak dapat secara langsung mempengaruhi demokrasi, sedangkan panah putus-putus menunjukkan bahwa minyak tidak secara langsung mempengaruhi demokrasi. Artinya, minyak dapat memperlemah atau memperkuat institusi, yang pada gilirannya berdampak pada demokrasi. Dalam penelitian ini, RST dan kerangka mekanisme kasual Ross digunakan untuk menjelaskan penurunan demokrasi di Venezuela dan konsolidasi demokrasi di Chile. Kedua negara ini berfungsi sebagai studi kasus yang kontras untuk menganalisis bagaimana efek *resource curse* dapat dimitigasi oleh kekuatan institusi dan keberhasilan reformasi demokrasi.

Untuk menguji hipotesis bahwa ketergantungan minyak dapat menghambat demokrasi, penelitian ini mengadopsi pengukuran dari Ross (2008) dan Bergougui & Murshed (2020). Variabel independen fokus pada kekayaan minyak yang diukur melalui *Oil Rent*, *GDP Per Capita*, dan *Oil Production Per Capita*. Sementara itu, variabel dependen berfokus pada lima prinsip demokrasi yang diidentifikasi oleh *Varieties of Democracy* (V-DEM), yaitu *Electoral*, *Liberal*, *Participatory*, *Deliberative*, dan *Egalitarian Democracy Index*. Melengkapi pengukuran yang dilakukan oleh Ross dan Bergougui & Murshed, penelitian ini juga mempertimbangkan penambahan variabel dependen yang mendukung kualitas demokrasi, seperti *Corruption Perception Index*, *Government Censorship Effort - Media*, dan *Political Right*.

Variabel Independen	Deskripsi
<i>Oil Rent (% of GDP)</i>	Mengukur profitabilitas ekonomi dari produksi minyak terhadap total <i>Gross Domestic Product</i> (GDP) suatu negara. Variabel ini relevan untuk menilai sejauh mana negara bergantung pada pendapatan minyak sebagai sumber utama pendapatan, merefleksikan selisih antara nilai produksi minyak mentah dengan biaya produksi total.
<i>GDP Per Capita</i>	Mengukur pendapatan rata-rata per individu di suatu negara. Variabel ini digunakan untuk menjustifikasi hubungan antara kekayaan minyak dan kesejahteraan masyarakat.
<i>Oil Production Per Capita</i>	Mengukur ketergantungan negara pada sumber daya minyak dengan melihat angka produksi minyak. Tingginya angka produksi menjadi indikator kuat ketergantungan pada penghasilan minyak.

Tabel 1. Deskripsi Variabel Independen
Sumber: Diolah oleh penulis

Variabel Dependen	Deskripsi
<i>Electoral Democracy Index</i>	Mengukur aspek pemilihan umum, khususnya responsivitas pemerintah terhadap warga negara.
<i>Liberal Democracy Index</i>	Menilai hak pilih dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara untuk memastikan pengawasan dan mencegah konsentrasi kekuasaan berlebihan. Prinsip ini menekankan perlindungan hukum dan kebebasan individu.
<i>Deliberative Democracy Index</i>	Menekankan pentingnya diskusi kolektif dalam proses pengambilan keputusan politik.
<i>Participatory Democracy Index</i>	Mengukur tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun organisasi sosial.
<i>Egalitarian Democracy Index</i>	Menekankan kesetaraan hak dan akses bagi seluruh masyarakat dalam partisipasi pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan.
<i>Corruption Perception Index</i>	Mengukur persepsi elite politik terhadap adanya penyalahgunaan jabatan, baik itu di sektor publik, pejabat maupun politisi.
<i>Government Censorship Effort - Media</i>	Mengukur upaya sensor media oleh pemerintah, di mana penyensoran bertentangan dengan demokrasi.
<i>Political Right</i>	Mengukur kebebasan politik, dengan fokus pada pemilihan umum yang adil dan bebas, pluralisme dan bebas dari tekanan pemerintah.

Tabel 2. Deskripsi Variabel Dependen

Sumber: Diolah oleh penulis

Kelima indeks demokrasi oleh V-DEM menggunakan skala 0-1, di mana skor rendah mengindikasikan kualitas demokrasi yang buruk dan otokrasi, sedangkan skor tinggi menunjukkan demokrasi kuat. Data V-Dem memiliki signifikansi tinggi dalam mengukur aspek demokrasi, sehingga diharapkan menghasilkan temuan regresi yang kuat. Selain indeks V-Dem, variabel lain juga dipertimbangkan untuk memperkaya penjelasan sistem demokrasi. Studi menunjukkan bahwa sumber daya alam rentan menimbulkan masalah di negara berkembang, terutama ketika lembaga penjaga demokrasi rusak, mendorong korupsi, menghambat efisiensi birokrasi, dan menguatkan pemerintahan otoriter (Castillo, 2021).

Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan keterkaitan di dalamnya. Pertama, peningkatan *Oil Rent* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas demokrasi, yaitu terhadap demokrasi elektoral, liberal, deliberatif, partisipatif, egaliter, persepsi korupsi, upaya sensor media, dan kebebasan politik. Semakin tinggi *Oil Rent* maka kualitas demokrasi semakin menurun karena ketergantungan ekspor minyak semakin menguat, sehingga pemerintah acap kali melanggar norma-norma demokrasi. Berpengaruh negatif karena semakin tinggi skornya maka semakin baik, sedangkan semakin rendah skornya semakin buruk. Kedua, peningkatan *GDP Per Capita* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas demokrasi. Artinya, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara maka demokrasiya juga akan baik dan stabil. Sebaliknya, semakin rendah *GDP* juga rendahnya kesejahteraan masyarakat maka korelasi dengan korupsi, penyensoran, media, dan hilangnya kebebasan hak politik semakin kuat. Ketiga, peningkatan produksi minyak memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas demokrasi. Dengan kata lain, pemerintah akan semakin bergantung pada penghasilan minyak tersebut, dan tidak melibatkan masyarakat dalam struktur politik dan ekonomi negaranya. Sehingga, secara keseluruhan penelitian ini menguji bagaimana ketergantungan pemerintah terhadap pendapatan minyak mampu mempengaruhi kualitas demokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis dan menjelaskan teori mengenai hubungan antara ketergantungan minyak dan demokrasi. Dengan

menggunakan studi kasus Venezuela sebagai *petrostate* dan Chile sebagai negara demokrasi stabil, analisis dilakukan dalam bentuk *time-series* dari tahun 2000 hingga 2020. Rentang waktu ini dipilih karena mencakup periode transisi politik dan ekonomi pasca-konsolidasi demokrasi di Chile, serta masa konsolidasi otoritarianisme di Venezuela. Sehingga, analisis data akan dilakukan menggunakan regresi linier berganda.

Variabel independen dalam penelitian ini berfokus pada kekayaan minyak, yaitu *Oil Rent*, *GDP Per*, dan *Oil Production Per Capita*. Data-data dari variabel independen didapatkan melalui *World Bank* dan *Our World in Data*. Sedangkan variabel dependen berfokus pada kualitas demokrasi, yang diukur menggunakan lima indeks dari *Varieties of Democracy* (V-DEM), yaitu *Electoral*, *Liberal*, *Deliberative*, *Participatory*, dan *Egalitarian Democracy Index*. Untuk memperkaya pengukuran kualitas demokrasi, penelitian ini juga menyertakan variabel *Corruption Perception Index* dari *Transparency International*, *Government Censorship Effort – Media* dari V-Dem, dan *Political Right* dari *Freedom House*.

Peneliti memastikan validitas regresi dan terpenuhinya asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dengan melakukan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, linearitas, heteroskedastisitas, dan auto korelasi. Secara keseluruhan, penelitian ini akan menguji 24 hipotesis, di mana H1-H8, *Oil Rent* diasumsikan memiliki pengaruh negatif terhadap demokrasi; H9-H16, *GDP per capita* diasumsikan memiliki pengaruh positif terhadap demokrasi; H17-H24, *Oil Production* diasumsikan memiliki pengaruh negatif terhadap demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh minyak terhadap demokrasi tidak selalu sejalan dengan asumsi *Rentier State Theory*. Temuan justru mengindikasikan bahwa dampak minyak terhadap demokrasi seringkali bersifat tidak langsung, dengan kualitas institusi berperan sebagai mediator utama. Penelitian ini menguji bagaimana ketergantungan pada minyak, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan volume ekstraksi minyak secara signifikan memengaruhi delapan indikator kualitas demokrasi yang diteliti.

Electoral Democracy Index

Venezuela	Coefficients		
	Coeff. B	Std. Error	Sig.
<i>Oil Rent</i>	0.000	0.002	0.904
<i>GDP Per Capita</i>	1.920E-06	0.000	0.627
<i>Oil Production Per Capita</i>	5.340E-06	0.000	0.007
Chile			
<i>Oil Rent</i>	0.060	0.079	0.463
<i>GDP Per Capita</i>	-1.740E-05	0.000	0.136
<i>Oil Production Per Capita</i>	1.310E-06	0.000	0.000

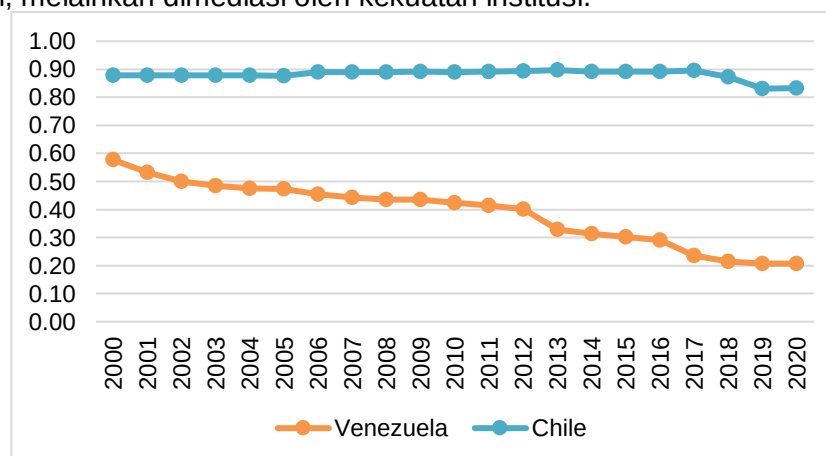
Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda dari Variabel *Electoral Democracy Index* di Venezuela dan Chile

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan *Oil Rent* dan *GDP Per Capita* di antara kedua negara tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan demokrasi elektoral. Sedangkan, nilai signifikan pada produksi minyak di kedua negara menunjukkan adanya pengaruh secara signifikan, di mana Venezuela dengan nilai Sig 0.007 dan Chile dengan nilai 0.000. Namun, koefisien di kedua negara menunjukkan adanya hubungan positif. Sehingga, hasil regresi menunjukkan bahwa arah koefisien bertentangan dengan hipotesis awal yang mengasumsikan bahwa peningkatan ketergantungan minyak dapat menurunkan kualitas demokrasi elektoral. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya perbedaan konteks politik dan institusional di antara kedua negara.

Di Venezuela, pengaruh signifikan dari produksi minyak terhadap demokrasi elektoral tidak mengindikasikan penguatan demokrasi, melainkan penguatan pada demokrasi yang

dikendalikan oleh rezim. Rezim Chávez dan Maduro secara strategis memanfaatkan pemilihan umum sebagai alat legitimasi politik, meskipun dengan praktik represif. Represi di Venezuela mencakup penekanan persaingan oposisi, penyalahgunaan lembaga negara, sumber daya, dan media, serta pelanggaran kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Rezim Chávez dan Maduro mengontrol peradilan, kongres, dan oposisi, independensi kelembagaan serta supremasi hukum, khususnya dalam pemilu, menjadi tidak konstitusional. Akibatnya, produksi minyak justru memperkuat kapasitas represif negara dan melemahkan institusi demokrasi (Jiménez, 2023). Pada dasarnya, demokrasi elektoral masih berjalan di Venezuela, namun hal tersebut tidak memperkuat demokrasi karena terdapat praktik manipulatif untuk memperpanjang masa pemerintahan rezim otoriter. Fenomena ini sejalan dengan temuan Andersen, bahwa persaingan elektoral pada negara yang kaya minyak nyata adanya dan signifikan. Pemilihan umum menjadi tonggak yang diinginkan para pemimpin otoriter di negara kaya minyak, hal tersebut akan terus terjadi ketika produksi minyak terus mengalami peningkatan (Andersen et al., 2022).

Sebaliknya, di Chile, pengaruh signifikan produksi minyak terhadap demokrasi elektoral memiliki implikasi yang berbeda, sehingga tidak dapat diartikan sebagai penguatan demokrasi langsung oleh minyak, melainkan karena sistem institusional yang stabil sebelum ekstraksi tembaga terjadi. Hal ini dapat menjelaskan mengapa hasil regresi bertentangan dengan hipotesis, karena institusi mampu menekan dampak kutukan sumber daya melalui tata kelola fiskal yang transparan dan sistem pemilu yang tidak represif. Di sisi lain, Chile memiliki kebijakan yang mampu menangkal gejala kutukan sumber daya, yaitu melalui *Chile's Structural Fiscal Surplus Rule*, merupakan kebijakan fiskal berbasis institusi yang dibuat pada tahun 2001. Kebijakan ini dibuat untuk menghadapi guncangan harga tembaga, serta mencegah adanya politisasi pendapatan komoditas dengan membatasi pengeluaran negara hanya pada level pendapatan jangka panjang yang struktural (Kumhof & Laxton, 2009). Dengan demikian, hasil tembaga Chile tidak dapat menjadi alat patronase, seperti Venezuela. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Chile mampu menghalau isu-isu ledakan sumber daya, seperti *dutch disease* dan kutukan sumber daya. Oleh karena itu, Chile menjadi studi kasus bagaimana institusi fiskal berperan dalam menentukan dampak sumber daya terhadap demokrasi, serta sebagai tolok ukur efektivitas institusi dalam membatasi efek politik dari sumber daya alam. (Frankel et al., 2011). Temuan regresi yang signifikan mendukung bahwa volume minyak tidak secara langsung menentukan arah demokrasi, melainkan dimediasi oleh kekuatan institusi.



Grafik 3. Tren *Electoral Democracy Index* di Venezuela dan Chile, 2000–2020
Sumber: Diolah oleh penulis dari *V-Dem*

Grafik ini menunjukkan penurunan ekstrem indeks demokrasi elektoral Venezuela, di mana terdapat perbandingan kontras dengan Chile selama dua dekade terakhir. Visualisasi ini memperjelas bagaimana hasil regresi terhadap demokrasi elektoral. Temuan ini menjelaskan bahwa kasus Venezuela secara langsung berpengaruh terhadap penurunan demokrasi sesuai dengan arah panah yang dibuat oleh (Bergougui & Murshed, 2020). Sedangkan di Chile tidak

secara langsung mempengaruhi demokrasi, karena masih ada peran institusi untuk menangkalkan efek politik dari sumber daya alam. Secara keseluruhan, temuan ini mendukung asumsi Ross dalam hal signifikansi produksi minyak terhadap institusi demokrasi, tetapi menolak asumsi dalam *rentier effect* yang menganggap bahwa minyak secara langsung menurunkan demokrasi.

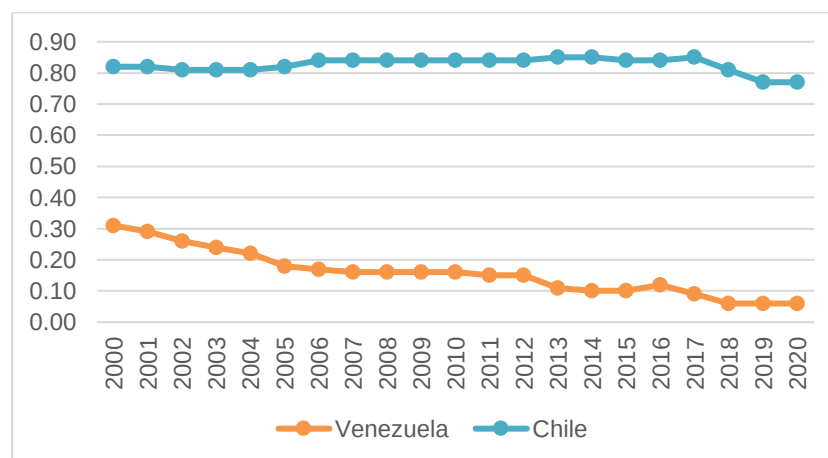
Liberal Democracy Index

Venezuela	Coefficients		
	Coeff. B	Std. Error	Sig.
Oil Rent	-0.001	0.001	0.658
GDP Per Capita	-6.333E-07	0.000	0.853
Oil Production Per Capita	2.718E-06	0.000	0.079

Chile			
Oil Rent	-0.009	0.159	0.954
GDP Per Capita	-3.947E-05	0.000	0.182
Oil Production Per Capita	2.932E-06	0.000	0.001

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda dari Variabel *Liberal Democracy Index* di Venezuela dan Chile

Hasil regresi menunjukkan bahwa *Oil Rent* dan *GDP Per Capita* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap demokrasi liberal. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas demokrasi liberal di kedua negara tidak secara langsung dipengaruhi oleh pendapatan dari sektor minyak, di mana pengaruhnya sangat bergantung pada bagaimana pendapatan tersebut dikelola dan didistribusikan. Menariknya, *Oil Production Per Capita* justru menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap demokrasi liberal di Chile (0,001), namun tidak signifikan di Venezuela (0,079). Disparitas ini menunjukkan bahwa dampak produksi minyak terhadap demokrasi dapat bervariasi secara substansial, tergantung pada kualitas institusional negara. Temuan ini secara statistik membantah asumsi teori yang menyatakan bahwa ketergantungan sumber daya akan secara langsung melemahkan demokrasi liberal, termasuk kebebasan sipil dan supremasi hukum. Sebaliknya, hal ini menyoroti peran mediasi institusi yang kuat.



Grafik 4. Tren *Liberal Democracy Index* di Venezuela dan Chile, 2000–2020
Sumber: Diolah oleh penulis dari V-Dem

Meskipun secara statistik tidak signifikan, tren grafik di atas secara jelas menunjukkan penurunan drastis indeks demokrasi liberal di Venezuela. Degradasi ini mencerminkan pelemahan sistem *checks and balances* di bawah rezim Chávez dan Maduro, yang secara sistematis mengikis institusi demokrasi sejak 1999 melalui kontrol yudikatif, legislatif, militer, dan

media. Chávez merebut kekuasaan tanpa persetujuan Kongres Nasional dengan merancang konstitusi baru. Meskipun perebutan kekuasaan terus terjadi, oposisi anti-Chavista sempat memiliki kontrol atas media, militer, lembaga-lembaga pengawas, serta *Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)* perusahaan minyak Venezuela. Akibatnya, hal tersebut mendorong adanya strategi radikal seperti kudeta tahun 2002 dan mogok minyak di tahun 2003. Strategi yang dilakukan oleh oposisi mendorong Chávez semakin radikal dengan memecat petinggi militer dan manajemen PDVSA, serta menggunakan pendapatan minyak untuk membeli dukungan domestik dan internasional. Tindakan ini menandai titik balik penting dalam transformasi Venezuela dari demokrasi cacat menjadi otoriter (Gamboa, 2024). Praktik *institutional capture* membuat kebebasan sipil dan supremasi hukum menjadi tidak berfungsi, di mana rezim mempengaruhi lembaga demokrasi melalui berbagai cara, sehingga pendapatan minyak digunakan untuk memperkuat otoritarianisme.

Sebaliknya, Chile berhasil mempertahankan indeks demokrasi liberal yang tinggi (di atas 0.8) selama dua dekade. Signifikansi *Oil Production per apita* di Chile tidak berarti minyak secara langsung memperkuat demokrasi, melainkan menunjukkan bahwa institusi yang kuat, yang telah terbentuk sejak masa transisi pasca-Pinochet, mampu membatasi politisasi sumber daya. Penguatan jalur institusional seperti Mahkamah Konstitusi, Kongres Nasional, dan kebijakan fiskal transparan menjadikan Chile contoh keberhasilan konsolidasi demokrasi liberal meskipun memiliki kekayaan sumber daya. Hasilnya, Chile berhasil mengadopsi kebijakan fiskal seperti *Structural Fiscal Surplus Rule* yang mampu mencegah adanya politisasi pendapatan komoditas, khususnya tembaga. Chile membuktikan adanya kekuatan hukum dan mekanisme *checks and balances* membuat demokrasi liberal tetap stabil, sehingga demokrasi liberal dapat stabil bukan karena ketimpangan sumber daya dengan Venezuela, namun karena ada keberadaan institusi yang membatasi ruang politisasi sumber daya.

Dengan demikian, perbedaan institusional antara Venezuela dan Chile menjelaskan adanya ketimpangan dalam kualitas demokrasi liberal. Di Venezuela, minyak dijadikan alat untuk memperkuat otoritarianisme dengan memanfaatkan kerangka demokrasi. Sedangkan di Chile, keberadaan institusi diperkuat untuk mengatasi ledakan sumber daya dan mengonsolidasikan demokrasi liberalnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dunning (2008) dan Bergougui & Murshed (2020) bahwa pengaruh kekayaan sumber daya terhadap demokrasi sangat bergantung pada kualitas institusi. Hipotesis awal yang menyatakan bahwa ketergantungan sumber daya melemahkan demokrasi liberal tidak sepenuhnya terbukti, karena peran mediasi institusi jauh lebih dominan.

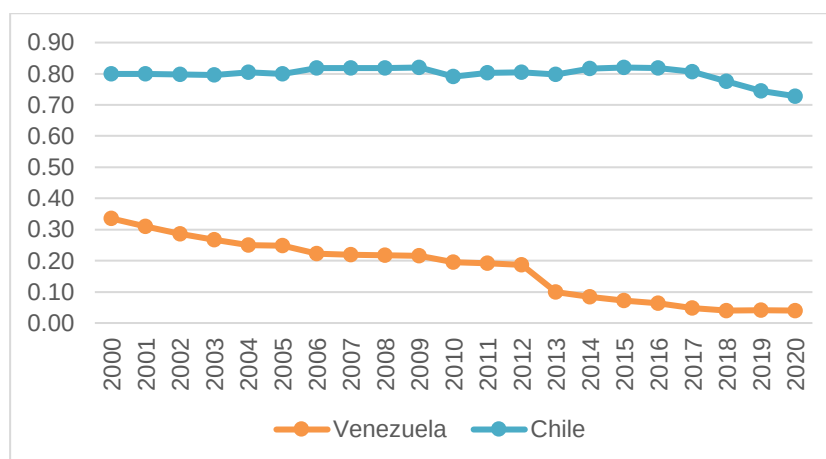
Deliberative Democracy Index

Venezuela			
	Coeff. B	Coeff. Std. Error	Sig.
Oil Rent	0.000	0.002	0.940
GDP Per Capita	2.527E-06	0.000	0.620
Oil Production Per Capita	5.224E-06	0.000	0.027
Chile			
Oil Rent	0.079	0.074	0.305
Oil Production Per Capita	0.000	0.000	0.000

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda dari Variabel *Deliberative Democracy Index* di Venezuela dan Chile

Berdasarkan hasil regresi, *Oil Rent* dan *GDP Per Capita* tidak berpengaruh di kedua negara. Namun, *Oil Production* berpengaruh, di Venezuela bernilai 0.027, sedangkan di Chile bernilai 0.000. Di sisi lain, peneliti menghapus variabel *GDP Per Capita* Chile guna kesesuaian data agar tidak mengalami gejala multikolinearitas. Selain itu, koefisien B bertentangan dengan hipotesis yang seharusnya menunjukkan hubungan negatif, yaitu bahwa produksi minyak berkorelasi negatif terhadap kualitas demokrasi. Hipotesis awal mengasumsikan bahwa semakin tinggi produksi

minyak, maka negara akan semakin bergantung pada sewa sumber daya. Oleh karena itu koefisien B seharusnya negatif. Di sisi lain, situasi Chile sangat menarik karena koefisiennya menunjukkan hubungan positif dan signifikan, hal ini justru menjelaskan bahwa minyak memperkuat demokrasi deliberatif. Sedangkan di Venezuela juga menunjukkan adanya hubungan positif, sehingga dapat diartikan bahwa ada peran institusional dan peran negara dalam mengatur minyak. Temuan ini justru memperkuat pandangan bahwa dampak minyak tergantung pada kekuatan institusi negara.



Grafik 5. Tren *Deliberative Democracy Index* di Venezuela dan Chile, 2000–2020
Sumber: Diolah oleh penulis dari V-Dem

Grafik di atas menunjukkan perbedaan besar di antara kedua negara, sehingga terdapat perbedaan hasil demokrasi deliberatif. Produksi minyak memang signifikan berpengaruh terhadap demokrasi deliberatif, namun pada praktiknya masih terdapat masalah dan halangan untuk mewujudkan ruang dialog tersebut. Di Venezuela, meskipun *Oil Production Per Capita* berpengaruh signifikan secara statistik, namun praktik demokrasi deliberatif sangat terbatas. Pemerintahan yang represif dan sentralisasi kekuasaan pada eksekutif menyebabkan ruang dialog masyarakat menyusut drastis, sebagaimana terlihat dari penurunan indeks demokrasi deliberatif mendekati angka 0. Meskipun ada upaya untuk membangun lembaga deliberatif seperti *Communal Councils*, kontrol pemerintah yang ketat membuat partisipasi ini tidak otentik dan cenderung menjadi alat sentralisasi kekuasaan.

Sebaliknya, Chile membuat masyarakat berperan aktif dalam dapat ikut dalam proses pengambilan keputusan publik. Terutama pasca aksi protes di tahun 2019, Chile berusaha untuk membangun dialog sosial dan partisipasi publik. Sehingga dapat dilihat bahwa proses deliberatif politik telah menjadi bagian dari masyarakat dan negara. Dapat dikatakan bahwa meski Chile tidak memiliki produksi minyak tinggi, adanya keberadaan lembaga yang inklusif membuat deliberasi publik terus terjalin. Sehingga kekayaan sumber daya memang tidak secara langsung mempengaruhi demokrasi, namun berperan tidak langsung melalui jalur institusi, seperti yang terlihat pada forum *Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES)*, mengatur tentang stabilisasi berbasis surplus pendapatan tembaga dan melibatkan banyak lembaga masyarakat, *think tank*, dan serikat pekerja.

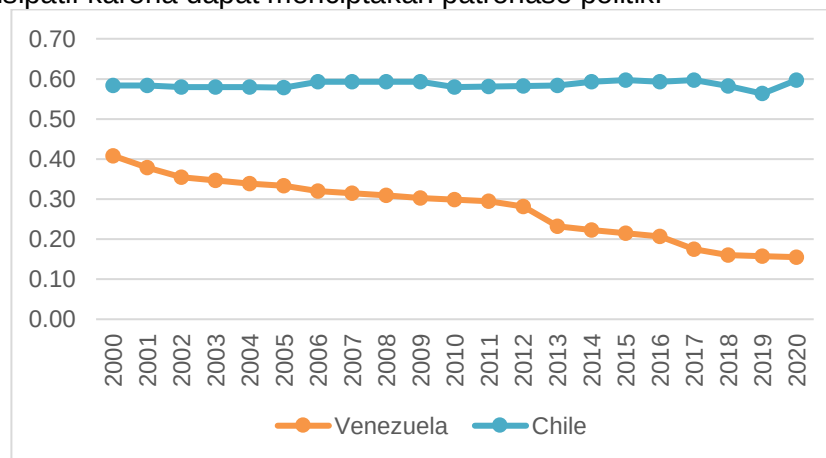
Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak sepenuhnya terkonfirmasi. Kasus Chile membuktikan bahwa produksi sumber daya dapat dikelola secara deliberatif untuk mendukung stabilitas dan kualitas demokrasi, menantang asumsi *rentier state theory* yang memprediksi pelemahan demokrasi. Sehingga, hipotesis hanya terjawab sebagian, dan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa relasi antara sumber daya dan demokrasi bersifat tidak langsung dan sangat ditentukan oleh peran institusi dan mekanisme deliberatif dalam proses pengambilan kebijakan.

Participatory Democracy Index

	Coeff. B	Coefficients Std. Error	Sig.
Venezuela			
Oil Rent	0.000	0.001	0.739
GDP Per Capita	8.771E-07	0.000	0.772
Oil Production Per Capita	3.455E-06	0.000	0.017
Chile			
Oil Rent	-0.144	0.100	0.178
GDP Per Capita	-5.798E-05	0.000	0.002
Oil Production Per Capita	-2.518E-07	0.000	0.436

Tabel 6. Hasil Regresi Linier Berganda dari Variabel *Participatory Democracy Index* di Venezuela dan Chile

Berbeda dengan hasil regresi sebelumnya, regresi ini menunjukkan bahwa produksi minyak per kapita di Venezuela (0.017) berpengaruh signifikan terhadap demokrasi partisipatoris, namun memiliki nilai koefisien yang kecil (3.455E-06) sehingga tidak bermakna secara substantif. Artinya, partisipasi masyarakat tidak didasarkan pada angka produksi minyak, tetapi lebih pada bagaimana negara membuka ruang keterlibatan politik. Di Chile, PDB per kapita menunjukkan hubungan yang signifikan (0,002) dengan koefisien negatif (-5,798E-05). Namun, hasil ini tidak mencerminkan realitas di Chile, di mana masyarakatnya tidak tergantung secara ekonomi untuk terlibat dalam politik. Secara keseluruhan hasil regresi ini tidak menjawab hipotesis penelitian, karena hipotesis awal menyatakan bahwa produksi minyak memiliki hubungan negatif pada demokrasi partisipatif karena dapat menciptakan patronase politik.



Grafik 6. Tren *Participatory Democracy Index* di Venezuela dan Chile, 2000–2020

Sumber: Diolah oleh penulis dari *V-Dem*

Di Venezuela, meskipun produksi minyak berkorelasi dengan peningkatan partisipasi politik, partisipasi ini seringkali bersifat kabur dan berada di bawah kontrol otoriter. Partisipasi politik cenderung terpusat pada kelompok pro-pemerintah dan loyalis Hugo Chávez, di mana hanya kelompok-kelompok pro-pemerintah saja yang memiliki kesempatan untuk aktif berpartisipasi secara politik, hal ini menyebabkan adanya bias partisan. Hawkins menjelaskan bahwa pemerintahan Hugo Chávez terbantu oleh produksi dan pendapatan minyak yang signifikan, dana-dana tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program partisipatif ini seperti *consejos comunales* dan *misiones bolivarianas* (Hawkins, 2010). Akibatnya, partisipasi rakyat di bawah pemerintahan Hugo Chávez menjadi eksklusif dan terkonsentrasi pada pro-pemerintah, bukan hasil dari inklusi institusional yang merata, serta tidak ada ruang deliberasi lintas kelompok yang membuat tingkat partisipasi hanya berpusat pada lingkaran loyalis

(Pogrebinschi, 2018). Di sisi lain, bentuk partisipasi tersebut tidak otonom karena cenderung masuk ke strategi kontrol politik. Pada akhirnya menyebabkan indeks demokrasi partisipasi Venezuela terus menurun seiring berjalannya tahun, yang tercermin dari penurunan indeks demokrasi partisipatif Venezuela dari 0.4 menjadi 0.1 selama dua dekade terakhir.

Berbeda dengan Venezuela, indeks demokrasi partisipatif di Chile cenderung stabil di rentang 0.6. Partisipasi politik di Chile cenderung independen dari kontrol pemerintah, memungkinkan saluran demokrasi dimanfaatkan untuk memengaruhi kebijakan publik. Meskipun Chile tidak mengandalkan minyak, pengelolaan pendapatan tembaga telah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung program sosial. Di bawah kepemimpinan Michelle Bachelet di tahun 2015, pemerintah secara aktif membuka ruang dialog dengan warga dalam proses penyusunan konstitusi baru. Dialog warga menjadi salah satu cara meningkatkan demokrasi partisipatif di Chile. Tapi di sisi lain, partisipasi yang dipromosikan negara sejak 1990-an seringkali justru menjauhkan masyarakat sipil dan lebih berfungsi sebagai alat kontrol. Sejak 2011, organisasi sipil mulai aktif memanfaatkan teknologi digital untuk membangun ruang partisipasi alternatif, dari pemantauan parlemen sampai transparansi kampanye. Protes besar 2019 membuktikan bahwa partisipasi sejati lebih banyak muncul dari tekanan akar rumput. Jadi, walaupun secara angka Chile terlihat stabil, kekuatan partisipasinya sebenarnya lebih ditopang oleh masyarakat sipil daripada negara itu sendiri (Pogrebinschi, 2023).

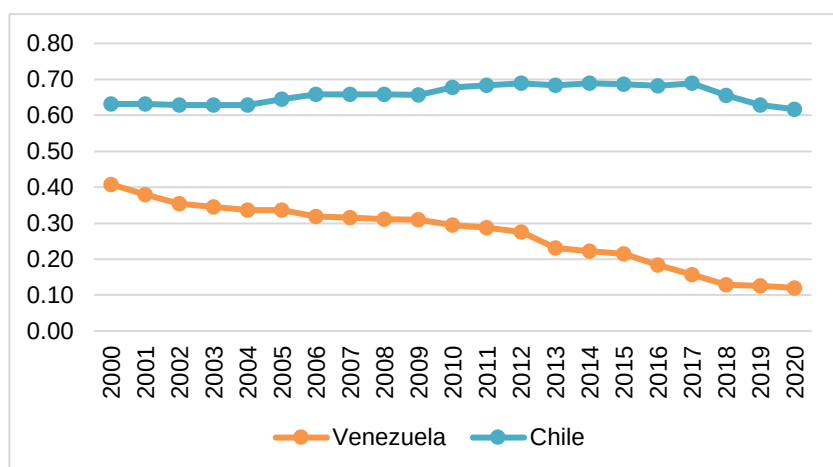
Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak sepenuhnya terbukti. Di Venezuela, pengaruhnya lemah karena ada kebijakan populis bukan dari partisipasi warga. Sedangkan di Chile, partisipasi masyarakat jauh lebih aktif karena ada tekanan dari masyarakat sipil. Sehingga kualitas demokrasi partisipatif tidak secara langsung disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan lebih dipengaruhi oleh kekuatan institusi dan ruang sipil yang lebih kuat dalam memfasilitasi partisipasi yang otentik dan inklusif.

Egalitarian Democracy Index

	Coefficients		
	Coeff. B	Std. Error	Sig.
Venezuela			
Oil Rent	-1.030E-05	0.001	0.994
GDP Per Capita	4.887E-07	0.000	0.873
Oil Production Per Capita	4.058E-06	0.000	0.007
Chile			
Oil Rent	-0.290	0.134	0.052
GDP Per Capita	6.569E-06	0.000	0.722
Oil Production Per Capita	4.875E-06	0.000	0.000

Tabel 7. Hasil Regresi Linier Berganda dari Variabel *Egalitarian Democracy Index* di Venezuela dan Chile

Hasil regresi menunjukkan bahwa *Oil Production Per Capita* berpengaruh secara signifikan terhadap demokrasi egaliter, baik di Venezuela (0.007) maupun Chile (0.000). Namun, koefisien menunjukkan nilai positif di kedua negara yang menandakan pengaruhnya bertentangan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa peningkatan produksi minyak akan menurunkan demokrasi egaliter. Sedangkan variabel *Oil Rent* dan *GDP Per Capita* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap demokrasi egaliter baik di kedua negara.



Grafik 7. Tren *Egalitarian Democracy Index* di Venezuela dan Chile, 2000–2020

Sumber: Diolah oleh penulis dari *V-Dem*

Demokrasi egalitarian menekankan pada kesetaraan hak seluruh kelompok masyarakat, di mana seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Artinya, demokrasi dapat berjalan ketika kekuasaan atas pemerintahan dapat didistribusikan secara merata bagi seluruh warga negara. Grafik di atas menunjukkan adanya ketimpangan mencolok antara Chile dan Venezuela. Sejak tahun 2000-an, skor Venezuela semakin menurun, menunjukkan bahwa hak masyarakat terhadap pengambilan kebijakan semakin berkurang. Sedangkan Chile mampu mempertahankan indeks egaliternya selama dua dekade.

Di Venezuela, produksi minyak berpengaruh signifikan terhadap demokrasi egaliter, hal ini menunjukkan bahwa Venezuela memanfaatkan minyaknya untuk mempengaruhi kesetaraan politik. Berangkat dari demokrasi partisipatif, hanya beberapa kelompok terdekat saja yang mampu berkontribusi dalam proyek minyak, sehingga kesetaraan politik hanya berlaku bagi kelompok-kelompok penting saja. Di sisi lain, terdapat paradoks yang memperlihatkan bahwa rezim Chávez menggunakan pendapatan minyak untuk membiayai proyek sosial, yaitu *Misiones Bolivarianas* atau *Bolivarian Missions*, bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Namun program sosial ini tidak memiliki banyak informasi yang dapat diandalkan karena terdapat berbagai misi yang tidak terselesaikan dan tidak memberikan dampak besar terhadap kelompok masyarakat. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan (Luis Pedro España, 2008). Namun, program tersebut juga menciptakan ketergantungan terhadap kelompok oposisi. Sehingga hal ini menghalangi kesetaraan dan membatasi akses masyarakat terhadap hak politik, pelayanan publik, dan program lain yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu.

Sedangkan di Chile signifikansi positif produksi minyak terhadap demokrasi egaliter tidak bersumber dari minyak sebagai variabel ekonomi utama. Pada bagian ini, signifikansi merupakan cerminan dari sistem distribusi politik yang telah menguat melalui institusi demokratis. Chile sendiri merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang memiliki akses politik dan ekonomi lintas kelas. Chile berhasil karena memiliki struktur perpajakan progresif dan jaminan sosial untuk warganya, terutama masyarakat rentan. Ditambah dengan pemilu yang terbuka, di mana jarang ada rezim yang menguasai membuat setiap masyarakat memiliki akses untuk masuk ke ranah politik. Oleh karena itu, Chile mampu membuka akses partisipasi dan kontrol terhadap pemerintah oleh semua kelompok, tidak hanya elite. *V-Dem* membuktikan bahwa Chile memiliki akses politik yang merata di antara kelompok gender, kelas ekonomi, dan etnis, dengan skor di atas 0.8 selama dua dekade terakhir. Hanya saja, dampak dari kesetaraan di negara demokrasi adalah munculnya ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi, di mana semua masyarakat memiliki kelas yang sama, berbeda dengan Venezuela yang sudah terfokuskan pada kelas elite otoriter.

Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak terbukti sepenuhnya. Di Venezuela, produksi minyak memengaruhi demokrasi egaliter dengan paradoks penguatan kontrol rezim, sedangkan

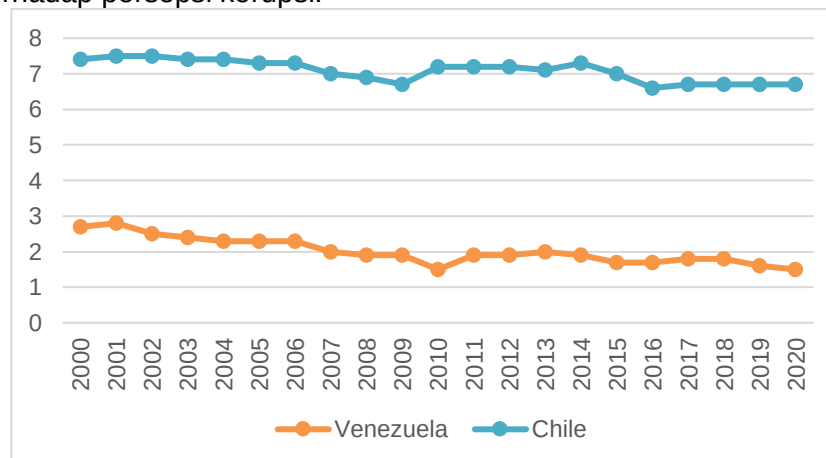
di Chile, institusi yang kuat berperan besar dalam mengelola kesetaraan dan kontrol demokratis. Masyarakat di Chile memiliki akses yang relatif merata terhadap partisipasi politik, layanan publik, dan perlindungan hukum dalam sistem yang transparan dan akuntabel.

Corruption Perception Index

Venezuela	Coefficients		
	Coeff. B	Std. Error	Sig.
Oil Rent	0.006	0.010	0.562
GDP Per Capita	-5.514E-05	0.000	0.045
Oil Production Per Capita	1.235E-05	0.000	0.238
Chile			
Oil Rent	3.624	4.311	0.417
GDP Per Capita	0.002	0.001	0.006
Oil Production Per Capita	-1.165E-05	0.000	0.444

Tabel 8. Hasil Regresi Linier Berganda dari Variabel *Corruption Perception Index* di Venezuela dan Chile

Hasil regresi dari tabel di atas menunjukkan bahwa *GDP Per Capita* berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi korupsi di kedua negara. Venezuela memiliki nilai signifikan sebesar 0.045 dengan koefisien -5.514E-05, sedangkan Chile sebesar 0.006 dengan koefisien 0.002. Di sisi lain, *Oil Rent* dan *Oil Production* tidak memiliki dampak signifikan terhadap persepsi korupsi. Arah koefisien variabel *GDP per capita* justru negatif, berbanding terbalik dengan hipotesis yang mengarah ke hubungan positif. Sehingga posisi Chile menunjukkan bahwa *GDP Per Capita* berpengaruh terhadap persepsi korupsi.



Grafik 8. Tren *Corruption Perception Index* di Venezuela dan Chile, 2000–2020

Sumber: Diolah oleh penulis dari *Transparency International*

Grafik di atas menunjukkan tren persepsi korupsi di Venezuela dan Chile, di mana dapat dilihat bahwa kedua negara memiliki tren yang hampir stabil namun dengan tingkatan yang berbeda. Chile dengan persepsi korupsinya yang tinggi (korupsi rendah) dan Venezuela dengan persepsi korupsi yang lebih parah (korupsi tinggi). Kedua negara juga terlihat tidak mengalami tren ekstrem, namun tetap terlihat ada penurunan indeks tiap tahunnya. Dalam konteks korupsi, pertumbuhan ekonomi dan penyediaan layanan publik menjadi terhambat akibat buruknya sistem ekonomi negara, bahkan korupsi dapat merampas hak asasi manusia dan merebut kebebasan politik penduduknya. Hal tersebut sering kali disebabkan oleh pemimpin populis yang terus menghancurkan demokrasi (Pring & Vrushni, 2019)

Di Venezuela, korupsi merupakan manifestasi utama dari kutukan sumber daya dan *petrostate*, terutama di bawah pemerintahan Hugo Chávez dan Maduro yang marak dengan praktik korupsi, nepotisme dan praktik ilegal. Terutama pada tahun 2004-2014, di mana PDVSA

yang merupakan sumber utama pendapatan negara menjadi ladang penyalahgunaan kekuasaan. Maya (2018) menjelaskan bahwa korupsi PDVSA melibatkan pencucian uang, suap, dan bisnis ilegal yang nilainya lebih dari US\$7 miliar. Kejahatan lainnya juga tercatat, seperti penyelewengan perusahaan dengan melibatkan sektor asuransi hingga distribusi minyak. Terdapat lebih dari 60 pejabat PDVSA (termasuk presiden dan eksekutif) yang terlibat dalam kejahatan ini. Kondisi Venezuela sudah menjadi krisis kemanusiaan, di mana uang rakyat sebesar US\$400 miliar telah disalurkan ke luar negeri dan digelapkan di bawah pemerintahan presiden Hugo Chavez dan Nicolás Maduro. Selain itu, krisis akibat sanksi Amerika menyebabkan perekonomian menjadi lumpuh dan menyebabkan produksi minyak yang merupakan pendapatan negara selama satu abad menjadi jatuh. Di tambah dengan korupsi dan pengelolaan minyak oleh perusahaan minyak nasional yang salah justru menambah keterpurukan Venezuela. Fenomena ini memperjelas bahwa korupsi di Venezuela memberikan dampak pada persepsi elite, yang ditunjukkan dengan rendahnya skor persepsi di bawah angka 3. Kemudian diperparah dengan runtuhnya struktur ekonomi dan tata kelola negara.

Sebaliknya, di Chile, signifikansi *GDP Per Capita* terhadap persepsi korupsi mendukung hipotesis bahwa peningkatan pendapatan nasional dapat berkorelasi dengan tingkat korupsi yang rendah, terutama jika diikuti oleh pengawasan fiskal yang baik. Chile memiliki persepsi korupsi yang tinggi (stabil di angka 7-8), Meskipun Chile tidak sepenuhnya bebas dari skandal korupsi, pemerintah secara aktif memanfaatkan insiden tersebut untuk mendorong retorika dan undang-undang anti-korupsi (Lopez, 2019).

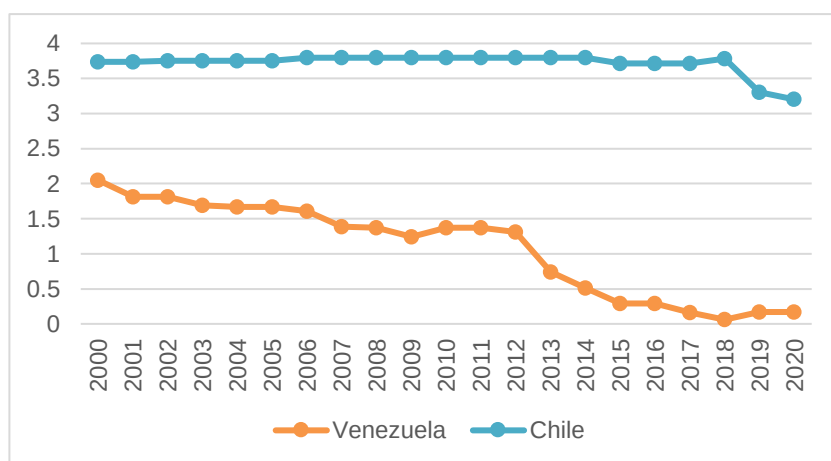
Dengan demikian, hipotesis terbukti sebagian. *GDP Per Capita* di Venezuela yang berkorelasi negatif menandakan pendapatan nasional meningkat diikuti dengan persepsi korupsi yang tinggi. Sedangkan di Chile, korelasi antara *GDP Per Capita* dan tingkat korupsi bersifat positif, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional dapat berdampak pada tingkat korupsi yang rendah. Oleh karena itu, temuan ini juga mengkritisi teori *rentier state*, di mana kekayaan sumber daya secara otomatis melemahkan kualitas demokrasi. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya institusi yang kuat dan otonom, maka pendapatan sumber daya hanya akan dimanfaatkan untuk memperkuat rezim otoriter. Oleh karena itu, dalam menjelaskan persepsi korupsi, faktor institusional lebih berperan besar dibandingkan sekadar jumlah minyak yang diproduksi.

Government Censorship Effort- Media

	Coeff. B	Coefficients Std. Error	Sig.
Venezuela			
Oil Rent	0.015	0.011	0.218
GDP Per Capita	2.720E-05	0.000	0.386
Oil Production Per Capita	2.410E-05	0.000	0.082
Chile			
Oil Rent	0.534	0.655	0.431
GDP Per Capita	1.297E-05	0.000	0.927
Oil Production Per Capita	4.367E-06	0.000	0.378

Tabel 9. Hasil Regresi Linier Berganda dari Variabel *Government Censorship Effort- Media* di Venezuela dan Chile

Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap upaya penyensoran media yang dilakukan pemerintah di kedua negara. Meskipun secara statistik tidak signifikan, temuan ini bukan berarti bahwa tidak ada upaya penyensoran media, baik di Venezuela maupun di Chile. Sebab dalam praktiknya, upaya penyensoran media tetap terjadi dan dilakukan oleh pemerintah guna memanfaatkan media sebagai jaringan komunikasi. Terutama di negara-negara otoriter, penyensoran sering kali terjadi.



Grafik 9. Tren *Government Censorship Effort-Media* di Venezuela dan Chile, 2000–2020

Sumber: Diolah oleh penulis dari *V-Dem*

Grafik di atas menunjukkan tingginya upaya penyensoran di Venezuela, dibuktikan dengan indeks di rentang 0-2 yang menandakan upaya penyensoran telah dilakukan berulang kali. Sedangkan di Chile, indeks menunjukkan angka 3-4, artinya upaya penyensoran tidak dilakukan, jika pun ada, penyensoran dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu.

Di Venezuela, indeks penyensoran menunjukkan bahwa pemerintah konsisten melakukan pembatasan terhadap kebebasan pers dan media. Hal tersebut dibuktikan melalui penutupan stasiun oposisi, seperti *Radio Caracas Televisión* (RCTV) di tahun 2007 yang kemudian digantikan dengan media pro-pemerintah. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pemilik media swasta untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, menyensor perbedaan pendapat untuk menghilangkan pandangan kritis terhadap kebijakan mereka, serta mengontrol narasi untuk memengaruhi opini publik (Puyosa, 2021). Model ini dikenal sebagai *media control authoritarianism*, di mana media oposisi tidak hanya bergerak sebagai penyampai berita, namun juga sebagai aktor politik yang dapat bergerak untuk memulai gerakan untuk melawan otoritarianisme dan memfasilitasi perlawanan terhadap pemerintah (Knight & Tribin, 2022). Hasil regresi memang tidak menunjukkan adanya signifikansi antara variabel kekayaan sumber daya terhadap penyensoran, namun hal tersebut justru membuktikan bahwa upaya penyensoran lebih terkait dengan konsolidasi kekuasaan otoriter, bukan karena pendapatan minyak maupun GDP.

Sementara itu, di Chile juga tidak menunjukkan adanya hubungan signifikan, karena Chile tidak melakukan penyensoran media setelah bertransisi menjadi negara demokrasi. Pasca kepemimpinan Pinochet, Chile mengalami liberalisasi pers dan mengesahkan undang-undang sejak tahun 2001, yaitu "*Law on Freedom of Opinion and Information and the Practice of Journalism*" yang mengatur mengenai hak kebebasan bersuara, hak untuk mendapatkan informasi tanpa adanya penyensoran (*World Press Freedom Day: Chile's History and Challenges*, 2024). Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Chile juga melakukan penyensoran media. Sapiezynska dan Lagos (2016) menuliskan bahwa penyensoran di Chile dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui konsentrasi kepemilikan media oleh kelompok bisnis besar (swasta), yaitu dengan menguasai koran nasional, radio, majalah, hingga televisi guna mengontrol media. Mereka mendominasi pasar iklan yang menyebabkan adanya praktik *self-censorship*, akibatnya para pemimpin sosial, masyarakat adat, perempuan dan anak, serta masyarakat miskin kurang terwakili oleh media.

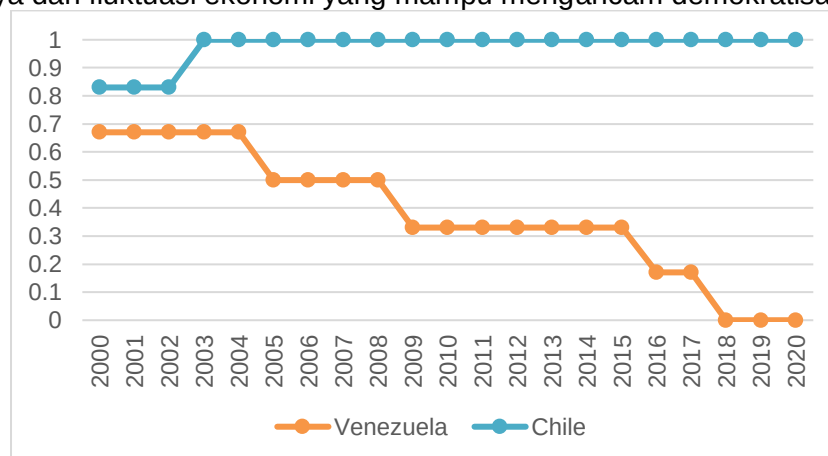
Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak terbukti. Temuan ini menegaskan bahwa upaya penyensoran media lebih merupakan aspek politik otoriter di Venezuela, sementara di Chile, meskipun ada bentuk penyensoran tidak langsung, hal itu tidak dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Temuan ini membuktikan bahwa penyensoran terjadi karena aspek politik dibanding ekonomi.

Political Rights

	Coeff. B	Coefficients Std. Error	Sig.
Venezuela			
Oil Rent	0.001	0.004	0.731
GDP Per Capita	-2.081E-05	0.000	0.035
Oil Production Per Capita	8.946E-06	0.000	0.029
Chile			
Oil Rent	0.334	1.120	0.771
GDP Per Capita	0.000	0.000	0.618
Oil Production Per Capita	5.395E-06	0.000	0.323

Tabel 10. Hasil Regresi Linier Berganda dari Variabel *Political Rights* di Venezuela dan Chile
Sumber: Diolah oleh penulis dari *V-Dem*

Hasil regresi pada variabel *Political Rights* menunjukkan bahwa ada dua variabel yang berpengaruh signifikan di Venezuela, yaitu *GDP Per Capita* (0.035) dengan koefisien negatif (-2.081E-05) dan *Oil Production Per Capita* (0.029) dengan koefisien positif (8.946E-06). Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis tidak terbukti, karena hipotesis awal menunjukkan bahwa peningkatan *GDP Per Capita* justru berkorelasi dengan penurunan kebebasan politik. Sedangkan untuk peningkatan *Oil Production Per Capita* justru berkorelasi dengan peningkatan kebebasan politik. Di sisi lain, tidak ada satupun variabel yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan untuk kebebasan politik di Chile. Meskipun demikian, temuan ini sejalan dengan konteks politik Chile, di mana hak politik dilindungi secara kelembagaan, diikuti dengan tidak adanya pengaruh sektor sumber daya dan fluktuasi ekonomi yang mampu mengancam demokratisasi negara.



Grafik 10. Tren *Political Rights* di Venezuela dan Chile, 2000–2020
Sumber: Diolah oleh penulis dari *V-Dem*

Grafik di atas menunjukkan adanya ketimpangan skor antara Venezuela dan Chile. Venezuela mengalami penurunan tajam dalam dua dekade terakhir, sedangkan Chile menunjukkan adanya peningkatan skor pada tahun 2003 dan menjadi stabil di tahun-tahun berikutnya. *The Freedom House Index* secara konsisten menunjukkan bahwa *political rights* di Venezuela menjadi semakin memburuk sejak Chávez memerintah di tahun 1999. Sedangkan di Chile, masyarakat puas dengan hasil demokrasi yang berasal dari hasil perkembangan ekonomi dan dalam kebebasan politiknya. Progres tersebut berkembang secara signifikan sejak tahun 1990-an (Navia, 2011)

Penurunan indeks kebebasan politik Venezuela hingga mendekati 0 mengindikasikan pembatasan hak-hak warga negara secara masif. Terutama pada rezim Maduro yang secara sistematis mengendalikan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk yudikatif, legislatif, militer, dan media. Penelitian oleh Svensson menunjukkan bahwa sejak tahun 2013-2019 pelanggaran terhadap kebebasan politik masyarakat Venezuela terus meningkat. Hal tersebut dibuktikan oleh cara pemerintah Maduro yang menggunakan hukum untuk memanipulasi lembaga, memperkuat kekuasaan eksekutif, membungkam oposisi, dan membatasi kebebasan berpendapat serta kebebasan masyarakat untuk berserikat. Selain itu, rezim juga memanfaatkan militer sebagai alat represi politik, di mana militer telah mengontrol industri dan aksi demonstrasi (Svensson, 2019). Fenomena ini membuktikan bahwa kebebasan politik di Venezuela sangat lemah, di mana masyarakat tidak diberi ruang untuk menuntut haknya akibat tekanan rezim otoriter dan militer. Rezim memanfaatkan hal tersebut memastikan produksi minyak dapat terkonsentrasi penuh pada pemerintah, hal ini menyebabkan adanya pola patron dan korupsi. Kekuatan rezim otoriter di Venezuela menyebabkan mereka memegang kendali pada minyak terutama dalam segi pendapatan maupun kebijakan, namun tidak ada transparansi dalam prosesnya, karena tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan dominasi politiknya (Rodríguez, Morales, & Monaldi, 2012).

Sebaliknya, kebebasan politik di Chile cenderung stabil bahkan setelah era rezim militer Pinochet. Sistem politik Chile yang kokoh dan tidak bergantung pada pendapatan ekonomi telah berhasil mempertahankan stabilitasnya. Melalui transparansi dan mengedepankan kemajuan, Chile mampu terhindar dari penurunan demokrasi karena berhasil bertransformasi dan memperkuat kebebasan politik warganya. Temuan ini sesuai dengan kondisi Chile, di mana demokrasi yang stabil yang diikuti dengan peran institusi dapat menjaga stabilitas hak politik tanpa bergantung pada kondisi kekayaan sumber daya alam.

Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak terbukti karena arah korelasi yang terbalik di Venezuela dan tidak adanya pengaruh signifikan di Chile. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas kebebasan politik lebih ditentukan oleh kekuatan institusional dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, bukan semata-mata oleh kekayaan sumber daya alam.

PENUTUP

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Oil Production Per Capita* secara signifikan berkorelasi negatif terhadap kualitas demokrasi, sedangkan *Oil Rent* dan *GDP Per Capita* tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Analisis komparatif Venezuela dan Chile menjadi kunci dalam memahami dinamika ini. Di Venezuela, kelimpahan minyak tanpa dukungan institusi yang kuat justru mempercepat kemunduran demokrasi dan konsolidasi otoritarianisme, di mana kekayaan sumber daya menjadi alat rezim untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan melemahkan oposisi melalui praktik patronase. Sebaliknya, Chile membuktikan bahwa keberadaan sumber daya alam tidak secara langsung merusak demokrasi. Kekuatan institusi dan norma-norma demokratis yang kokoh di Chile, seperti keberhasilan tata kelola fiskal melalui *Chile's Structural Fiscal Surplus Rule* berhasil mencegah politisasi pendapatan komoditas dan menghindari kutukan sumber daya. Dengan demikian, penelitian ini mengkritisi asumsi *Rentier State Theory* yang sering menganggap kekayaan sumber daya secara otomatis menyebabkan kemunduran demokrasi. Hasil studi ini justru menekankan bahwa dampak kekayaan alam terhadap demokrasi sangat bergantung pada jalur institusional dan kapasitas tata kelola masing-masing negara. Institusi yang lemah di Venezuela menjadikan sumber daya sebagai alat otoritarianisme, sementara institusi kuat di Chile mampu menjaga stabilitas demokrasi dan hak-hak politik warganya.

KETERBATASAN PENELITIAN

Secara teknis, penelitian ini menghadapi tantangan seperti multikolinearitas tinggi pada beberapa variabel yang memerlukan transformasi data (*lag transformation*) untuk menghindari bias. Selain itu, terdapat keterbatasan pada data *Oil Rent* Venezuela yang hanya tersedia hingga 2014, hal tersebut justru membatasi rentang waktu analisis. Meskipun demikian, studi ini tetap



memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa peran institusi adalah aspek penentu kualitas demokrasi. Untuk penelitian di masa depan, studi serupa dapat dikembangkan dengan memperluas jumlah negara yang dianalisis, dengan menggunakan rentang waktu data yang lebih panjang, dan menggali lebih dalam bagaimana desain institusional secara spesifik memengaruhi ketahanan demokrasi di negara-negara yang kaya akan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajili, H., & Hasanichenar, S. R. (2022). *IJEP International Journal of New Political Economy Rethinking the Rentier States and Democracy; Comparative Study of Saudi Arabia and Norway*. 3(1), 85–106.
- Andersen, J. J., Hamang, J. H., & Ross, M. L. (2022). *Declining Oil Production Leads to More Democratic Governments*. <https://www.cgdev.org/publication/declining-oil-production-leads-more-democratic-governments>
- Bergougui, B., & Murshed, S. M. (2020). New evidence on the oil-democracy nexus utilising the Varieties of Democracy data. *Resources Policy*, 69(April), 101905. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101905>
- Castillo, V. Z. (2021). Authoritarianism and the Rentier State - Venezuela and Nigeria “. *Fordham Research Commons*.
- Coppedge, M. (2024). Government censorship effort - Media. Retrieved from https://v-dem.net/data_analysis/CountryGraph/
- Corrales, J. (2020). Democratic backsliding through electoral irregularities: The case of Venezuela. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 109(109), 41–65. <https://doi.org/10.32992/erlacs.10598>
- Dean, J. (2024). *Democratic decline a global phenomenon, even in wealthy nations*. Cornell Chronicle. <https://news.cornell.edu/stories/2024/01/democratic-decline-global-phenomenon-even-wealthy-nations>
- Dunning, T. (2008). *Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes*. Cambridge, UK: Cambridge University Press
- Frankel, J. A., Alvarado, C., Calani, M., Cardenas, M., Céspedes, L., Giuliodori, M., Mühleisen, M., Ramirez, C. B., Rodriguez, V., Bacchetta, P., Beetsma, R., Balloch, C., Bustos, S., Martin, P., Perry, G., Schmidt-Hebbel, K., & Velasco, A. (2011). *NBER WORKING PAPER SERIES A SOLUTION TO FISCAL PROCYCLICALITY: THE STRUCTURAL BUDGET INSTITUTIONS PIONEERED BY CHILE*.
- Gamboa, L. (2024). Plebiscitary Override in Venezuela: Erosion of Democracy and Deepening Authoritarianism. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1), 124–136. <https://doi.org/10.1177/00027162241309709>
- Garrastazu, A., & Cagley, C. (2023). *How can Latin America halt its democratic backsliding? And how can the US help?* Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-can-latin-america-halt-its-democratic-backsliding-and-how-can-the-us-help/>
- Jiménez, M. (2023). Contesting Autocracy: Repression and Opposition Coordination in Venezuela. *Political Studies*, 71(1), 47–68. <https://doi.org/10.1177/0032321721999975>
- Knight, B., & Tribin, A. (2022). Opposition media, state censorship, and political accountability: Evidence from Chavez's Venezuela. *The World Bank Economic Review*, 36(2), 455–487.
- Kumhof, M., & Laxton, D. (2009). *Chile's Structural Fiscal Surplus Rule: A Model-Based Evaluation*. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp0988.pdf>
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How Democracies Die*. <https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/ResearchAndTeaching/How-Democracies-Die.pdf>
- Lopez, J. (2019). Corruption and its Effect on Economic Development in Chile, Mexico, and Brazil. *Governance: The Political Science Journal at UNLV*, 6(4). <https://digitalscholarship.unlv.edu/governance-unlv/vol6/iss1/4%0AThis>
- Luis Pedro España. (2008). *The Social Policy of the Bolivarian Revolution: Mission Tricks*.



- <https://revista.drclas.harvard.edu/bilingual-the-social-policy-of-the-bolivarian-revolution-mission-tricks/>
- Navia, P. (2011). Venezuela and Chile: Two Opposite Paths of Democratic Consolidation and Economic Development. *Western Hemisphere Security Analysis Center*, 23. <http://digitalcommons.fiu.edu/whemsac/23>
- Pogrebinschi, T. (2018). Deliberative Democracy in Latin America. *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*, October, 828–841. <https://doi.org/10.1093/oxfordhdb/9780198747369.013.20>
- Pogrebinschi, T. (2023). *Citizen Participation in Chile's Constitution-Making Processes*. <https://europeandemocracyhub.epd.eu/wp-content/uploads/2023/12/Case-Study-Chile.pdf>
- Pring, C., & Vrushii, J. (2019). *Global Corruption Barometer, Latin America & the Caribbean 2019 - Citizens' views and Experiences of Corruption*. www.transparency.org
- Puyosa, I. (2021). Asymmetrical information warfare in the Venezuelan contested media spaces. In *When Media Succumbs to Rising Authoritarianism* (pp. 32–45). Routledge.
- Rodríguez, P. L., Morales, J. R., & Monaldi, F. J. (2012). Direct Distribution of Oil Revenues in Venezuela: A Viable Alternative. Retrieved from <http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426486>
- Ross, M. (2001). Does Oil Hinder Democracy? *World Politics*, 53(3), 325–361. <https://doi.org/10.1353/wp.2001.0011>
- Ross, M. (2008). But seriously: does oil really hinder democracy? *October*, 1–40. www.yale.edu/leitner/resources/papers/ButSeriously.pdf
- Ross, M. (2012). The oil curse: How petroleum wealth shapes the development of nations. *The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations*, 1–289. <https://doi.org/10.1093/afraf/adt051>
- Singh, J. T. N. (2010). Governing the Extractive Sector : The Politics of Globalisation and Copper Policy in Chile, 3(3), 60–88.
- Svensson, E. (2019). *New Authoritarianism in Venezuela During Maduro - A Case Study on Civil and Political Rights Violations*.
- Tarzi, S. M., & Schackow, N. (2012). Oil and political freedom in third world Petro States: Do oil prices and dependence on petroleum exports foster uthoritarianism? *Journal of Third World Studies*, 29(2), 231–250.
- The Economist. (2023). *Latin America is under authoritarian threat*. <https://www.economist.com/graphic-detail/2023/02/15/latin-america-is-under-authoritarian-threat>
- World Press Freedom Day: Chile's history and challenges*. (2024, May 2). Marca Chile. <https://www.marcachile.cl/en/dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa-la-historia-de-chile-y-sus-desafios/>